

**ANALISIS PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL DAN
EKONOMI PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL
PADA KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan*



Oleh :

Nama : RASYID ZAMZAMI HSB
NPM :1705180035
Program Studi :Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RASYID ZAMSAMI HSB
NPM : 1705180035
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL DAN EKONOMI PASCA KEBLIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUSAWAN, SE, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RASYID ZAMZAMI HSB
N.P.M : 1705180035
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNANAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL DAN EKONOMI PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN MANDAILING NATAL ROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si
Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasyid Zamzami Hsb

Npm : 1705180035

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



(Rasyid Zamzami Hsb)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi sosial ekonomi setelah adanya kebijakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini melakukan analisis deskriptif untuk melihat kondisi sosial ekonomi, data yang digunakan untuk kondisi ekonomi itu adalah data PDRB, Pertumbuhan ekonomi, Struktur ekonomi, sedangkan untuk kondisi sosialnya data yang digunakan adalah data kemiskinan, IPM, dan pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkembangan indikator sosial di Kabupaten Mandailing Natal setiap tahunnya terus meningkat hal ini dapat dilihat dari kesehatan, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang setiap tahunnya terus meningkat dan jumlah kemiskinan terus menurun dan indikator ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan dan perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Mandailing Natal di era kepemimpinan Dahlan-Sukhairi ditahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dari kenaikan jumlah APBD berjalan seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam kata lain peningkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB.

Kata Kunci: Kebijakan Desentralisasi Fiskal, PDRB, Kemiskinan, IPM, APBD, Kesehatan, Pendidikan, Pengangguran

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Al

hamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perkembangan Indikator Sosial Dan Ekonomi Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara”** Shalawat beriringkan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan penulisan skripsi ini, Selanjutnya, tidak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izinnya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta ayahanda saya Bapak H. Khoilid Hsb dan Ibunda saya Ibu Nur Jannah Nst yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan membesarkan saya, mendidik, menjadi penyemangat hari-hari saya dan yang selalu mendukung dalam hal apapun dan selalu menyebut nama ku dalam doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk Dian Anjeli Siregar yang selalu membantu, mendukung dalam hal apapun saya mengucapkan banyak terima kasih.
4. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang membantu saya berupa ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam pembuatan tugas akhir ini sehingga terselesaikan dengan baik dan lancar..
5. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh dosen mata kuliah jurusan Ekonomi Pembangunan atas ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadikan amalan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan bagi penulis dalam mencapai kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan, Terima kasih

Medan, 10 Oktober 2021

Rasyid Zamzami Hsb

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Akademik.....	12
1.6.2 Non akademik.....	12
BAB II.....	13
LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Uraian teoritis	13
2.1.1 Pembangunan ekonomi.....	13
2.1.2Pertumbuhan Ekonomi	30
2.1.3 Teori Pendapatan Nasional.....	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Defenisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Variabel Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Defenisi Operasional Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Tempat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Jenis dan Sumber data	Error! Bookmark not defined.

3.5 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Analisi Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISA DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Mandailing Natal	Error! Bookmark not defined.
4.2 Perkembangan Indikator sosial.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Penduduk/ Demografi	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Tenaga Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Kesehatan.....	61
4.2.4. Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
4.2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Mandailing Natal	Error! Bookmark not defined.
4.3 Perkembangan Indikator Ekonomi	66
4.4 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal	69
BAB V.....	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 KESIMPULAN	73
5.2 Saran	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mandailing Natal 2015-2019 (Milyar Rupiah).....	8
Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandaling Natal 2016-2020.....	10
Tabel.4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2020.....	55
Tabel 4.2 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2020.....	57
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandaling Natal 2016-2020.....	65
Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (Miliar Rupiah) 2015-2019.....	66
Tabel 4.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2019 (ribu rupiah).....	69
Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mandailing Natal (Miliar) tahun 2017-2019.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2018-2020.....	8
Gambar 2.1 Kerangka konseptual.....	48
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mandailing Natal.....	54
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal (Ribu) Tahun 2015-2019.....	60
Gambar 4.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir, 2014-2020.....	62
Gambar 4.4 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Sekolah, tidak sekolah lagi, dan belum sekolah 2020.....	64
Gambar 4.5 PDRB Kabupaten Mandailing Natal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015-2019.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alenia IV pembukaan UUD 1945, pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan pancasila terutama dijiwai sila kelima, keadilan social seluruh rakyat Indonesia yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam GBHN 1998 (poin F:penjelasan ke-10) disebut bahwa arah dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi secara optimal dalam terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karna itu penting dan sangat krusial untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniyah sehingga keadilan dan pemerataan hasil hasil pembangunan merata di seluruh tanah air. Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu karena itu yang paling penting adalah semua upaya harus diarahkan sedemikian rupa sehingga proses-proses dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun makin mendekatkan pada tujuan nasional.

Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim, dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis setelah jatuhnya pemerintahan soeharto, serta sebagai reaksi yang kuat dari kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan sumber daya di pemerintah pusat selama tiga dekade terakhir. Masalahnya, pemerintah demokratis yang datang setelah pergantian rezim tidak memiliki kekuatan” pemersatu nasional” seperti yang dimiliki rezim sebelumnya, dan juga tidak memiliki daya setrival politis. Banyak provinsi yang kaya dengan sumber daya alam menyatakan ketidakpuasan atas hasil eksploitasi sumber daya alamnya yang sebagian besar digunakan oleh pemerintah pusat. Struktur pemerintah terpusat telah mengakibatkan kesenjangan regional antara jakarta dan jawa dengan luar jawa, maupun antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat Indonesia (Kuncoro, 2002).

Dalam konstelasi semacam ini dapat mudah menyulut ketidakpuasan daerah. Gerakan separatis mulai muncul di provinsi Timor Timur, Aceh, Papua dan skala yang lebih kecil terjadi di Riau, yang mengakibatkan terancamnya integritas nasional Indonesia. Dengan mengecualikan Timor-Timur, protes berbasis kedaerahan yang terjadi pada penghujung 1998 secara tegas mengindikasikan ketidakpuasan terhadap kebijakan desentralisasi pemerintahan dan keuangan sebagai pemicu utamanya (Pratikno,1999). Tuntutan terhadap otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi maupun merdeka, terutama datang dari daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya alam yang kuat, seperti Aceh, Irian Jaya dan Riau, yang memberikan kontribusi penting

terhadap pendapatan nasional, namun tidak memberikan alokasi keuntungan yang berarti. Presiden Habibie, yang memerintah setelah jatuhnya rezim Soeharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional, dan dihadapkan pada pilihan untuk melakukan pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat serta memberikan otonomi kepada daerah.

Pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi, yaitu UU No. 22/1999 mengenai pemerintahan daerah, dan UU no. 25/1999 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU No. 22/1999 mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada daerah. Keadaan tersebut, terutama motivasi politik, tidak diragukan lagi mempengaruhi banyak aspek dalam desain akhir desentralisasi seperti dituangkan dalam undang-undang yang berkaitan dengan otda. Setelah menerapkan sistem yang amat sentralistik, kedua UU di atas menegaskan adanya fungsi dan kewenangan pemerintah daerah yang lebih besar dibanding UU No.5/1975. Oleh karena itu, beberapa pengamat menyebut diterapkannya pendekatan *big bang*, radikal, dalam struktur pemerintah dan desentralisasi fiskal karena mengubah drastis pola hubungan hubungan pusat dan daerah.

Berdasarkan UU No.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam

UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

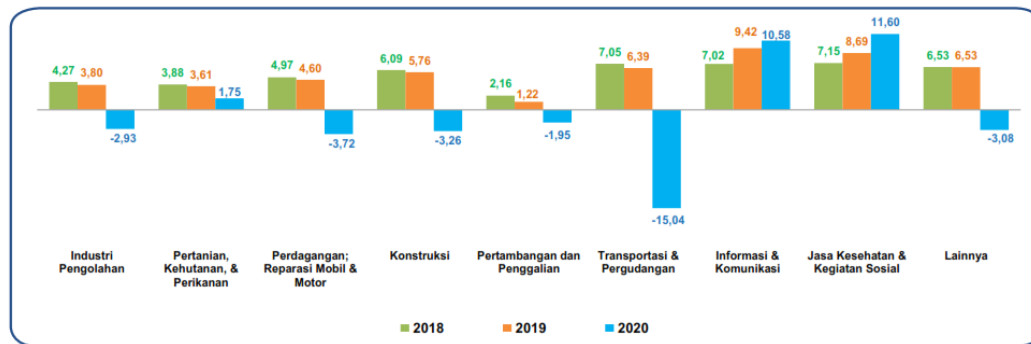
Menurut Todaro (2015). Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur social, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan (akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara maupun daerah. Ukuran keberhasilan suatu negara maupun daerah dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ditandai dengan kenaikan pendapatan daerah yang dihasilkan dari meningkatnya hasil produksi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang melambat ditandai dengan menurunnya hasil produksi. Untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi tersebut dilakukan berbagai upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal. Hal ini tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai peranan sebagai faktor produksi.

Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,3%, adalah salah satu negara yang sedang berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui pendapatan nasional yang ditunjukkan dengan besarnya nilai PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan dampak dari terjadinya pandemi perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%, dimana sebagian besar sector lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif dan hanya beberapa dari sector lapangan usaha tersebut yang memiliki pertumbuhan yang positif.

Gambar 1.1. pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2018-2020



Sumber: badan pusat statistik (<https://www.bps.go.id/>)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perekonomian indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan, sebagian besar sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif. Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,93 persen , sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor mengalami kontraksi sebesar -3,72 persen, sektor konstruksi mengalami kontraksi sebesar -3,26 persen, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar -1,95 persen, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup besar yaitu -15,04 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen. Penurunan dan kenaikan pertumbuhan ekonomi ini terjadi dikarenakan selama masa krisis virus covid-19 diberlakukan nya Pembatasan Sosial

Bersekala Besar (PSBB) di seluruh Indonesia, dan hal ini mengharuskan seluruh masyarakat melakukan seluruh aktifitas dilakukan dirumah secara online atau daring atau yang biasa disebut dengan Work From Home (WFH).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional yang membawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp 628.394,16 milyar yang tergolong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor pertanian sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai (21,65%). Selanjutnya sektor industri pengolahan (19,98%), sektor perdagangan (17,89%), sektor konstruksi (13,40%) dan sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 27,08% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (BPS Sumatera Utara).

Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Kabupaten Mandailing Natal terhadap Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja perekonomian sebuah Negara, pertumbuhan ekonomi yang biasanya diukur dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan sejauh

mana kinerja sector-sektor perekonomian dalam menghasilkan output. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila PDB yang dihasilkan meningkat dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Berikut dapat kita lihat kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015-2019.

Table 1.1

Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mandailing Natal 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.271,58	4.689,25	5.158,32	5.497,99	5.819,71
Pertambangan dan Penggalian	61,01	71,62	72,91	77,08	83,43
Industri Pengolahan	986,33	1.123,50	1.302,82	1.426,42	1.550,42
Pengadaan Listrik dan Gas	6,72	7,40	8,30	9,05	9,51
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,06	2,22	2,43	2,58	2,79
Konstruksi	1.230,04	1.381,69	1.511,68	1.671,49	1.839,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.312,05	1.493,89	1.637,61	1.795,71	1.968,61
Transportasi dan Pergudangan	188,33	214,99	225,54	244,23	260,40

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,43	81,36	85,91	93,55	100,86
Informasi dan Komunikasi	72,84	76,76	81,75	87,13	89,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	145,47	159,89	168,34	174,17	180,66
Real Estat	265,63	295,39	311,19	336,52	352,53
Jasa Perusahaan	10,44	11,01	11,96	12,53	13,51
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	753,60	826,34	894,80	931,82	1.001,95
Jasa Pendidikan	121,83	134,29	142,60	153,21	160,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,81	86,97	92,51	100,46	107,04
Jasa Lainnya	3,16	3,48	3,84	4,11	4,48
Produk Domestik Regional Bruto	9.586,34	10.660,04	11.712,51	12.618,05	13,544,745

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Mandailing Natal sebesar 9.586,34 (rupiah) sedangkan pada tahun 2016 sebesar 10,660,04 (rupiah) dan nilai PDRB Kabupaten Mandailing Natal di tahun 2019 yaitu sebesar 13.554,745 (rupiah). Kemudian sektor lapangan usaha yang paling banyak memberikan kontribusinya terhadap PDRB tersebut adalah Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan. Dengan memberikan kontribusi sebesar 4.271,58 (rupiah) pada tahun 2015 dan 5.819,71. (rupiah) pada tahun 2019.

Terkait dengan kewajiban pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya, kebijakan yang di dilakukan dapat memberikan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif , namun disisilain kewenangan pemerintah daerah harus memberikan konsekuensi kewajiban

untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi sumber keuangan secara optimal. Untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut;

Table 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandailing Natal 2016-2020

Kabupaten	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mandailing Natal	64,55	65,13	65,83	66,52	66,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal 2021

IPM di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016 sebesar (64,55) di tahun 2017 menjadi sebesar (65,13) dan di tahun 2018 menjadi sebesar (65,83) peningkatan (0,63) ke tahun 2019 sehingga menjadi (66,52) dan mengalami peningkatan lagi (0.27) ke tahun 2020 sehingga IPM menjadi sebesar (66,79). Kesimpulan dari tabel IPM dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Di suatu daerah IPM mendekati 100 maka di suatu daerah dianggap kualitas manusia tersebut dikatakan bagus.

Menurut uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Analisis Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi pasca kebijakan fiskal Pada Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Bagaimana perkembangan indikator sosial di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perkembangan indikator ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Tidak meratanya tingkat pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.
4. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap peningkatan Sumber daya Alam (SDA) di Kabupaten Mandailing Natal?
5. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah difokuskan pada perkembangan indikator social dan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara, sebagai hasil pemekaran wilayah Tapanuli Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perkembangan APBD di Kabupaten Mandailing Natal di era kepemimpinan Dahlan-Sukhairi?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan indikator social dan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2010-2020.

2. Melakukan analisis evaluasi tentang perkembangan APBD di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Akademik

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengetahui bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnakan penelitian tentang analisis perkembangan indikator sosial ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal.

1.6.2 Non akademik

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan indikator sosial ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian teoritis

2.1.1 Pembangunan ekonomi

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara

yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan menurut Nugroho dan Rochman Dahuri (2004) dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan meningkatnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekulerisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus

membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

A.Adam Smith

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara *agregat*. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian

permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

Kelemahan Teori Adam Smith

- a. Pengabaian masyarakat secara luas

- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

a. David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

b. Thomas Robert Malthus

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk

yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keternbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

c. **Teori Karl Marx**

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.

1. Menurutnya berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap :

2. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
3. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik factor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dsb. Karena murah nya harga buruh maka minat pemilik factor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.
4. Masyarakat fiodal, kaum bangsawan memiliki factor produksi utama yaitu tanah.. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sector pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya system fiodal. Kelas borjuis yang memiliki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tariff serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum fiodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai system ini

5. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh . Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas
6. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.
7. Marx meramalkan keruntuhan system kapitalis, menurutnya terjadi karena adanya :
 - a. Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya miskin semakin lebar
 - b. Kesengsaraan, karena kemiskinan semakin luas
 - c. Krisis, karena daya beli masyarakat semakin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (over production). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan.
 - d. Konsentrasi, penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana

produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

B. Aliran Kontrarevolusi Neo-klasik / Fundamintalisme Pasar

Menurut teori ini pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor : kenaikan kuantitas & kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi.

a. Aliran Neo-Klasik

Aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga (harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang). Neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diiktisarkan sebagai berikut:

1. Akumulasi Kapital

Menurut Neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan meningkatkan tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu bunga menentukan tingkat investasi. Perubahan teknologi menurut Neo-klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh/ relative lebih bersifat “penghemat buruh” dari pada “penghemat capital”. Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan-permintaan yang kuat akan barang-barang capital.

2. Perkembangan sebagai proses Gradual / terus-menerus

Menurut Alfred Marshall bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organic yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual atau terus-menerus.

3. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif

Proses yang harmonis & kumulatif ini meliputi berbagai factor dimana factor itu tumbuh bersama-sama. Misal, bila teknik produksi baru yang akan menaikkan produksi total / akan menaikkan pendapatan total dimana untuk menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai, sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu, karena kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal economies & external economies. Internal Economies timbul dari adanya mesin-mesin yang lebih luas manajemen yang lebih baik dan seba gainya sehingga ada kenaikan produksi. External economies timbul

adanya kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungannya dengan perkembangan pengetahuan dan kebudayaan. Jadi Marshall menekankan pada adanya sifat saling ketergantungan dan komplementer dari perekonomian. Mengenai kumulatifnya menurut Alien Young bahwa berkembangnya industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja diantara para buruh.

4. Optimis terhadap perkembangan ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena keterbatasan sumber daya alam. Dipihak lain berpendapat bahwa adanya kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Selalu akan ada kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu dan akan selalu ada permintaan masyarakat, hal ini menimbulkan kemungkinan baru bagi buruh untuk kenaikan upah. Bagi Neo-klasik hal penting untuk pertumbuhan ekonomi ialah kemauan untuk menabung.

5. Aspek internasional perkembangan ekonomi

tingkat perkembangan ekonomi:

- A. Mula-mula Negara meminjam capital / impor capital.
- B. Kemudian Negara peminjam tersebut setelah dapat menghasilkan dengan capital pinjaman tadi, membayar deviden dan bunga atas pinjaman tersebut.
- C. Tingkat selanjutnya setelah penghasilan nasional Negara itu meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan kenegara lain yang membutuhkan.

- D. Tingkat keempat, Negara tersebut kemudian sudah menerima deviden dan bunga lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus. Dengan kata lain untungnya semakin sedikit dan hutangnya semakin banyak.
- E. Akhirnya Negara itu hanya selalu menerima deviden dan bunga saja dari Negara lain.

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911 yang pada tahun 1934 diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Kemudian dia mengulas teorinya lebih dalam mengenai proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle*. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan (*Satagnasi*). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah *proses inovasi* dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan *output* total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan *output* masyarakat. Menurut

Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs*). *Inovasi disini* bukan hanya berarti perubahan yang “radikal” dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dan sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya.

C. Analisis post Keynesian

Ahli-ahli post-keynesian ialah mereka yang mencoba merumuskan perluasan teori Keynes. Post-keynesian memperluas sistem menjadi teori output dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisa fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya perkembangan ekonomi jangka panjang.

Dalam analisis ini persoalan yang penting ialah:

- A. Syarat yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan pendapat yang mantap (*steady growth*) pada tingkat pendapatan dalam kesempatan kerja penuh (*full employment income*) tanpa mengalami deflasi atau inflasi.
- B. Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau terus menerus.

a. Teori Harrod-Domar

Pada hakikatnya teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena mengungkapkan masalah – masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teori Harrod- Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantab. Menurut teori Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan.

Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional. mempunyai beberapa asumsi yakni :

- A. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full empyloyment*) dan faktor – faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh .
- B. Perekonomian tterdiri dari dua sector : sector rumah tangga dan sector perusahaan.

- C. Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional.
- D. Kecenderungan menabung besarnya tetap.

b. Teori Evsey D. Domar

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori sebagai berikut:

- A. Perekonomian sudah ada dalam pengerjaan tingkat penuh (*full employment income*)
- B. Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri
- C. Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*)
- D. Hasrat menabung marginal dan hasrat menabung rata-rata sama.
- E. *Marginal propensity to savedan Capital coeffisien* adalah tetap.

Dari teori ini dinyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan. Perekonomian kenyataannya menghadapi masalah yaitu bila investasi hari ini tidak cukup maka akan terjadi pengangguran. Bila ada investasi hari ini maka besok diperlukan investasi yang lebih banyak untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi bertambah.

c. Teori Harrod

Harrod menyelidiki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi ($GC=IS$) dimana G adalah tingkat pertumbuhan output atau

perbandingan antara naiknya income dan total income pada waktu tertentu. C adalah tambahan kapital atau perbandingan antara investasi dan kenaikan pendapatan (I/DY) dan S adalah tabungan. Investasi dan pendapatan harus tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang mantap untuk mempertahankan pengerjaan penuh dalam jangka panjang.

Kelemahan teori Harrod-Domar adalah teori menggunakan asumsi yang sulit. Faktor-faktor penting seperti hasrat menabung dan rasio kapital output dianggap tetap, sedangkan kenyataan pada jangka panjang faktor tersebut berubah-ubah yang akan mengubah syarat yang dibutuhkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi.

d. Teori Stagnasi Sekular (*Secular Stagnation*)

Stagnasi sekuler menunjukkan suatu fase perkembangan kapitalis yang telah masak dimana tabungan bersih pada tingkat full employment cenderung bertambah, sedangkan investasi bersihnya menurun. Ini menandakan kecenderungan jangka panjang menuju pada pengurangan kegiatan ekonomi. Perumusan sebab-sebab stagnasi sekuler adalah:

- A. Menitik beratkan pada peranan faktor-faktor eksogen seperti teknologi, perkembangan penduduk, pembukaan dan perkembangan daerah baru. Menurut A. Hansen, perkembangan penduduk yang cepat, pembukaan daerah baru dan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan menaikkan pendapatan. Menurut Keynes, perkembangan penduduk akan mendorong kenaikan ekonomi, menaikkan daya beli dan dapat memperluas pasar. Tertundanya perkembangan penduduk mengakibatkan akumulasi kapital relatif lebih banyak dari pada tenaga kerja.

- B. Menitik beratkan pada perubahan-perubahan dasar di dalam lembaga-lembaga sosial seperti meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dan perkembangan organisasi buruh.
- C. Menitik beratkan pada faktor-faktor endogen seperti perkembangan persaingan dan konsentrasi-konsentrasi perusahaan dalam industri.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dapat dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan pembangunan input. Berbeda pengertiannya dengan pembangunan ekonomi yang memiliki pengertian pertumbuhan ekonomi yang lebih luas baik dari segi struktur output, input, perubahan dalam teknik produksi, sikap dan perilaku sosial serta kerangka kelembagaan menuju kepada keadaan dan taraf hidup yang secara menyeluruh lebih baik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi disuatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Todaro, 2006) mengemukakan hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang baik.

Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara :

1. Akumulasi modal yang mengikuti setiap bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi “infrastruktur” ekonomi dan sosial. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat akan terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan

dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga pendidik dan sumber daya manusia yang terampil. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (*human capital*) dapat dianalogikan dengan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya tanah melalui investasi strategis.

2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan pasar domestiknya.
3. Kemajuan teknologi, terdapat tiga klasifikasi yaitu :
 - a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral
 - b. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja
 - c. Kemajuan teknologi yang hemat modal

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus dan Jhon Stuart Mill. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatian pada pengaruh pertumbuhan penduduk pada pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut investasi jangka panjang. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang.

3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Robert Solow (1970) dan Trevor Swan (1956) mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang disebut model pertumbuhan Neo Klasik. Model Solow-Swan memusatkan perhatian pada bagaimana pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perbedaan utama dengan Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow dan Swan menggunakan fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow Swan kurang restriktif dibabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.

4. Teori Pertumbuhan Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa motor penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dan pelakunya adalah para motivator. Menurut Schumpeter, yang lebih penting adalah kenaikan *output*

yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Penanaman modal atau investasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni penanaman modal otonomi (*autonomous investment*) yakni penanaman modal untuk melakukan inovasi. Jenis penanaman modal yang kedua yaitu jenis penanaman modal terpengaruh (*induced investment*) yakni penanaman modal yang timbul sebagai akibat kegiatan ekonomi setelah munculnya inovasi tersebut.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.

a. Metode Penghitungan PDRB

Ada dua metode yang dipakai untuk menghitung PDRB:

1. Metode Langsung

Dalam metode ini, penghitungan berdasar pada daerah, hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Pemakaian penduduk ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

- a. Pendekatan produksi
- b. Pendekatan pendapatan
- c. Pendekatan pengeluaran

2. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Pemakaian masing-masing metode pendekatan pada data yang tersedia pada kenyataannya pemakaian kedua ini metode tersebut saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah.

1. Perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Hasil penghitungan atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh NTB atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu produksi tertentu, biasanya satu tahun yang dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan.

NTB atas dasar harga yang berlaku yang didapat dari pengurangan NTB/*output* dengan biaya antara masing-masing nilai atas dasar harga berlaku. NTB menggambarkan perubahan volume/kuantum produksi yang dihasilkan dan tingkat perubahan dari masing-masing kegiatan sub sektor dan sektor. Mengingat sifat barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap faktor, maka penilaian NTB/*output* dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk sektor primer yang produksinya bisa diperoleh secara langsung dari alam seperti: pertanian, pertambangan, penggalian pertama kali dicari kuantum produksi dengan satuan standar yang biasa digunakan.

- b. Untuk sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air minum, dan sektor bangunan, penghitungannya sama dengan sektor primer. Data yang diperlukan adalah kuantum produksi yang dihasilkan serta harga produsen masing-masing kegiatan, sub sektor dan sektor yang bersangkutan.
- c. Untuk sektor yang secara umum produksinya berupa jasa seperti sektor perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah dan jasa pemerintah dan jasa-jasa untuk penghitungan kuantum produksinya dilakukan dengan mencari indikator produksi

2. Penghitungan Berdasarkan Harga Konstan

Penghitung atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. NTB berdasarkan atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan volume / kuantum produksi saja.

Pada dasarnya dikenal empat cara penghitungan nilai tambah ADH konstan, antara lain:

a. Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar. Hasilnya *output* dari biaya atas dasar harga konstan selanjutnya ditambah ADH konstan diperoleh dari selisi *output* dan biaya antara atas dasar harga konstan

b. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar konstan diperoleh dengan cara mengalihkan nilai tambah pada tahun dasar indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan atau indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan sebagainya tergantung mana yang lebih cocok dengan jenis kegiatan subsektor dan sektor dihitung.

c. Deflasi

Nilai tambah ADH konstan diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harganya digunakan sebagai deflator biasanya menggunakan indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar dan sebagai dasarnya tergantung mana yang lebih cocok. Indeks harga ini dapat juga dipakai sebagai indikator dalam keadaan dimana nilai tambah atas dasar konstan justru diperoleh dengan mengalihkan nilai tambah ADH konstan dengan indeks harga tertentu.

d. Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda yang dideflasi adalah *output* dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh selisih antara *output* dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan *output* atas dasar harga konstan adalah IHK atau IHPB sesuai cakupan komoditifnya.

Ada beberapa cara yang lazim digunakan dalam perhitungan pendapatan suatu daerah yakni:

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar

Diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambahb nilai bruto yang timbul dari seluruh perekonomian suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan, penyusutan serta pajak tidak langsung.

b. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antar konsep “bruto” dan konsep “netto” adalah karena pada konsep bruto, faktor penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep netto faktor penyusutan telah dikeluarkan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai sudut barang-barang modal yang terjadi selama ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh faktor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan “penyusutan” yang dimaksud diatas.

C. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan non faktor ekonomi. (sumber: Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. 2004. A Dictionary of Economics. Inggris: Penguin Books Ltd)

1. Faktor Ekonomi

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim / cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

c. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

d. Tenaga Manajerial Dana Organisasi Produksi

Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Organisasi ini berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dengan berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi ini

dilaksanakan dan di atur oleh tenaga kerja manajerial dalam berbagai kegiatannya sehari-hari. Dan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, para wiraswasta tampil sebagai tenaga organisator dalam menggerakkan berbagai sumber produksi dalam proses produksi dengan memperkenalkan penemuan baru yang dikenal sebagai inovasi.

e. Teknologi

Dalam pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara penyelesaian tugas. Kemajuan teknologi merupakan faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dan perubahan atau kemajuan teknologi tersebut dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lainnya. Kemajuan teknologi hemat modal akan menghasilkan metode produksi padat karya yang lebih efisien.

2. Faktor Non Ekonomi

a. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Struktur dan situasi politik dan administrasi pemerintah yang lemah merupakan faktor yang penghambat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Politik yang tidak stabil serta pemerintah yang lemah sangat menghambat kelancaran kemajuan ekonomi.

b. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi antara lain sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, kelembagaan masyarakat dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu.

c. Susunan dan Tertip Hukum

Susunan dan tertip hukum serta pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang keliru sering kali menghambat kemajuan ekonomi. Sehubungan dengan itu maka hukum harus dilaksanakan secara tertip dan konsekuen, yang ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Teori Pendapatan Nasional

Menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. “Pada paruh kedua abad ke-18, Francois Quesney adalah yang pertama kali mengukur aktivitas ekonomi atas dasar aliran. Pada tahun 1758 dia mempublikasikan *Tableau Economique*, yang membahas *circular flow* dari output dan pendapatan pada berbagai sektor dalam perekonomian. Pandangannya mungkin terinspirasi dari pengetahuannya tentang aliran memutar atau *circular flow* darah dalam tubuh, Quesney adalah dokter resmi bagi king louis xv dari Prancis”. Manurung (2008).

Ukuran kasar dari pendapatan nasional dikembangkan di Inggris sekitar dua abad lalu, tetapi perhitungan rinci untuk data ekonomi mikro dikembangkan di Amerika selama *The Great Depression*. Hasil berupa sistem perhitungan pendapatan nasional mencakup sejumlah besar data yang dihimpun dari berbagai sumber di Amerika. Data tersebut diringkas dan dirakit menjadi kerangka yang saling terkait, dan kemudian dilaporkan secara priode oleh pemerintah federal. Perhitungan pendapatan nasional Amerika adalah yang paling luas dilaporkan dan yang paling diamati di seluruh dunia.

Simon Kuznets sebagai salah satu pengembang perhitungan tersebut memperoleh penghargaan hadiah nobel.

“Perhitungan pendapatan nasional adalah berdasarkan ide bahwa belanja seseorang menjadi penerimaan orang lain. Ide bahwa belanja sama dengan penerimaan ini diungkapkan dalam sistem pembukuan *double-entry*, sehingga belanja pada output agregat dicatat pada sisi buku dan pendapatan dari sumber daya dicatat pada sisi lainnya. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi Amerika atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut”. Manurung (2008)

A. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pengeluaran

Seperti telah disebutkan di depan, salah satu cara untuk mengukur nilai GDP adalah dengan menjumlahkan seluruh belanja pada barang dan jasa akhir yang diproduksi perekonomian dalam satu tahun. Cara paaling mudah dalam memahami pendekatan pengeluaran pada GDP adalah membagi pengeluaran agregat menjadi empat komponen : konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Kita akan membahasnya satu per satu. Manurung (2008)

Konsumsi atau secara lebih spesifik pengeluaran konsumsi perorangan adalah pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga selama satu tahun. Konsumsi adalah belanja yang paling mudah dipahami dan juga bentuk belanja yang terbesar, yaitu sebesar dua pertiga dari GDP Amerika tahun 1990. Konsumsi meliputi pembelian

jasa seperti *dry cleaning*, potong rambut, dan perjalanan udara, pembelian tidak tahan lama seperti sabun, sop, dan pembelian barang tahan lama seperti televisi dan mebel. Barang tahan lama adalah yang dapat digunakan paling tidak selama tiga tahun.

Investasi, atau secara spesifik *investasi domestik swasta bruto* adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Secara lebih umum, investasi meliputi belanja pada produksi saat ini yang tidak digunakan pada saat ini. Bentuk investasi yang paling penting adalah kapital fisik baru, seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi juga meliputi pembelian konstruksi pemukiman baru. Meskipun investasi berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata investasi bernilai sepertujuh dari GDP Amerika selama tahun 1990-an.

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik *konsumsi dan investasi bruto pemerintah*, mencakup belanja semua tingkat pemerintahan pada barang dan jasa, dari pembersihan jalan bersalju sampai pembersihan ruang pengadilan, dari buku perpustakaan sampai upah petugas perpustakaan. Pembelian pemerintah bernilai hampir seperlima dari GDP Amerika selama tahun 1990-an. Pembelian pemerintah, dan juga GDP, tidak mencakup pembayaran tranfer, seperti social security, bantuan pemerintah kepada penerimaan bantuan dalam pengertian sebenarnya.

Komponen terakhir dari pengeluaran agregat adalah hasil interaksi antara perekonomian Amerika dan luar negeri. Ekspor neto sama dengan nilai ekspor barang dan jasa Amerika dikurangi impor barang dan jasa Amerika. Ekspor neto tidak hanya meliputi nilai perdagangan barang (yaitu barang yang dapat anda jatuhkan di atas kaki anda) tetapi juga jasa (invisibles, seperti parawisata, asuransi, akuntansi dan

konsultasi).mengingat belanja untuk konsumsi, investasi dan pembelian pemerintah meliputi juga pembelian barang dan jasa, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari GDP Amerika, sehingga kita harus mengurangi impor dari ekspor untuk mendapatkan efek neto dari sektor luar negeri pada GDP. Nilai impor Amerika melebihi nilai ekspor hampir pada setiap selama beberapa dekade terakhir ini, yang berarti bahwa ekspor neto Amerika selama ini selalu negatif.

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara sama dengan penjumlahan konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor neto yaitu nilai ekspor (X), dikurangi dengan nilai impor (M), atau (X-M). Penjumlahan komponen tersebut menghasilkan pengeluaran agregat, atau GDP

B. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pendapatan

Pendekatan pengeluaran menjumlahkan atau mengagregasikan pendapatan dari suatu produksi. Sistem pembukuan *double-entry* dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi output tersebut yaitu upah, bunga, sewa dan laba dari produksi. Harga *Hershey bar* mencerminkan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya sehingga sehingga batang permen tersebut sampai di rak grosir. Pendapatan agregat sama dengan semua penjumlahan pendapatan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Jadi kita dapat mengatakan bahwa Pengeluaran Agregat = GDP = Pendapatan Agregat.

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah,

kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. *Double counting* dihindari dengan cara hanya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna atau dengan cara menghitung nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas input dari perusahaan lain. Nilai tambah setiap tahap mencerminkan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhirnya adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian
Mujib Saerofi	Analisis pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sector potensial di Kabupaten Semarang (Pendekatan Model basis ekonomi dan SWOT)	Pertumbuhan ekonomi, PDRB, penduduk, jarak, sector-sektor ekonomi, komponen shift share dan SWOT.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada dua sektor ekonomi yang sangat potensial di Kabupaten Semarang untuk dikembangkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang. Kedua sektor ekonomi ini memiliki indeks LQ lebih besar dari satu (sektor basis) dan komponen diferensial (Dj) positif (pertumbuhan cepat). Sektor

			<p>ekonomi tersebut adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Pengembangan dua sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perolehan PDRB Kabupaten Semarang sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, kemudian penulis menganalisis lebih lanjut dengan metode SWOT tetapi mengingat penelitian ini bukan penelitian final, maka analisis pengembangannya hanya diarahkan pada sektor industri pengolahan dengan memfokuskan pembahasan pada industri tekstil dan garmen pada industri makro, dan industri kerajinan enceng gondok pada industri mikro karena industri tersebut adalah industri unggulan di</p>
--	--	--	---

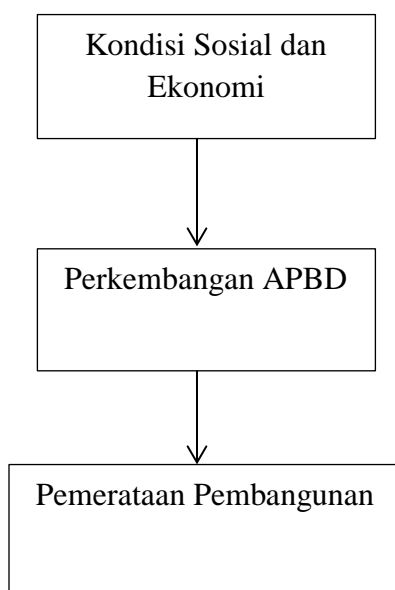
			kabupaten Semarang
Muhammad Imam Azhari	Pengaruh indicator makro ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara	Pertumbuhan ekonomi, Ekspor, Pengeluaran Pemerintah, angkatan kerja.	Hasil regresi menunjukkan bahwa Ekspor berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Angkatan Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian adanya hubungan antara Ekspor, Pengeluaran Pemerintah, dan Angkatan Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 98,45 % dan 1,55 % lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disebutkan dalam model ini.
Pipit Dwi Septiani	Pertumbuhan Ekonomi dan Kestabilan Politik di Indonesia	Indeks demokrasi Indonesia, Indeks Kebebasan sipil, Indeks hak Politik, Indeks Lembaga demokrasi, indeks	Dengan menggunakan data panel berupa provinsi-provinsi di Indonesia

		gini, pengeluaran modal dan tingkat partisipasi tenaga kerja.	selama periode 2010-2011 dan <i>fixed effect model</i> , kami menemukan bahwa variabel politik belum dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi di provinsi provinsi di Indonesia. Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak Politik, Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Gini tidak signifikan secara statistic.
Purnama	Analisis Perkembangan Kondisi Sosial dan Ekonomi Pasca Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Selatan	Pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, infrastruktur, kemiskinan, IPM dan pengangguran	1) Perkembangan kondisi sosial seperti variabel kemiskinan, IPM dan pengangguran setiap tahunnya mengalami kenaikan, dari kondisi ekonomi seperti variabel PDB, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi infrastruktur juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya. 2. Dari analisis uji beda terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi sebelum dan

			sesudah adanya otonomi daerah, sesudah otonomi kondisi sosial ekonominya terus mengalami peningkatan.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur dari suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam operasional. Yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah melakukan analisis studi deskriptif tentang perkembangan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal.



Gambar 2.1
Kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana deskriptif analisis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini akan dideskripsikan tentang perkembangan kondisi sosial dan ekonomi, dan perkembangan APBD di kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Metode dapat memberikan gambaran pada peneliti mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dan pemilihan metode yang tepat

dapat membantu peneliti dalam memecahkan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, (Mudrajad Kuncoro, edisi k.4) menyatakan bahwa suatu penelitian bertujuan untuk mengembangkan, membuktikan, menemukan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan.

3.2 Defenisi Operasional

Variabel penelitian ini terdiri dari indikator-indikator sosial dan ekonomi. Adapun variabel tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Penelitian

49

Variabel yang digunakan untuk mengetahui perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi adalah:

- 1) Pertumbuhan ekonomi
- 2) Pertumbuhan PDRB per kapita
- 3) Rasio PDRB kabupaten
- 4) Angka kemiskinan, sedangkan variabel yang digunakan untuk menghitung perkembangan sosial dan ekonomi adalah:
 - a) rasio siswa per sekolah
 - b) rasio siswa per guru
 - c) ketersediaan fasilitas kesehatan
 - d) ketersediaan tenaga kesehatan

3.2.2 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu

Variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Berikut definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Variabel	Indikator	Sumber
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • IPM • Pengangguran 	Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pendapatan perkapita • Infrastruktur • Struktur Ekonomi 	Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Mandailing Natal.

3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan adalah 3 bulan terhitung dari bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021.

3.4 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari pihak lain yang telah diproses dan dikumpulkan sebagai hasil atas penelitian yang dilaksanakan, sumber data tersebut antara lain:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal

2. Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lgger, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh BPS, Bappenas , dinas pemerintahan dan literatur.

3.6 Teknik Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$ Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal $\pm 6.620,70$ km² atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kab.Tapanuli Selatan;

Sebelah Selatan : Prov.Sumatera Barat;

Sebelah Barat : Samudera Indonesia;

Sebelah Timur : Prov.Sumatera Barat;

Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 % . Dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.

4.1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan di beberapa kecamatan, juga daerah pesisir/daerah pantai di Kecamatan Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis. Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Dataran rendah merupakan daerah pesisir, kemiringan 00 – 20 seluas 160.500 Ha (24,24%).
- b. Daerah/dataran landai, kemiringan 20 – 150 seluas 36.385 Ha (5,49%)
- c. Dataran Tinggi, kemiringan 150 – 400 . Dataran tinggi terdiri 2 jenis, yaitu
 1. Daerah perbukitan, kemiringan 150 – 200 seluas 112.000 Ha (16,91%)
 2. Daerah pegunungan, kemiringan 200 – 400 seluas 353.185 Ha (53,34%).

4.2 Perkembangan Indikator sosial

4.2.1. Penduduk/ Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data yang dihasilkan dari Survei Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan pusat Statistik sebanyak 472.886 dimana angka tersebut bertambah 67.941 jiwa dibandingkan dengan hasil survey penduduk tahun 2010. 472.886 jiwa yang terdiri dari 235.487 jiwa penduduk laki-laki dan 237.408 penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada pada Penyabungan sebanyak 90,049 jiwa, Angka sex ratio penduduk Kabupaten Mandailing

Natal adalah sebesar 99,2. Sex ratio adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang perempuan.

Tabel.4.1
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Batahan	11393	11116	22509	102,5
2.	Sinunukan	11020	10507	21527	104,9
3.	Batang natal	12737	12596	25333	101,1
4.	Lingga Bayu	13684	13683	27576	101,5
5.	Ranton Baek	2338	6913	14085	103,7
6.	Kotanopan	5246	14187	27871	96,5
7.	Ulu Pungkut	2338	2336	4674	100,1
8.	Tambangan	5246	5667	10913	92,6
9.	Lembah Sorik Marapi	5396	5572	10968	96,8
10.	Puncak Sorik Marapi	4468	4507	8975	99,1
11.	Muara Sipongi	6283	6245	12528	100,6
12.	Pakantan	1142	1080	2222	105,7
13.	Panyabungan	44533	45516	90049	97,8
14.	Panyabungan Selatan	5002	5321	10323	94,0
15.	Panyabungan Barat	5256	5421	10677	97,0
16.	Panyabungan Utara	11221	11352	22573	98,8
17.	Panyabungan Timur	7112	7102	14214	100,1
18.	Huta Bargot	4316	4432	8748	97,4
19.	Natal	17113	16784	33897	102,0
20.	Muara Batang Gadis	11412	10910	22322	104,6
21.	Siabu	26048	27238	53286	95,6
22.	Bukit Malintang	6297	6474	12771	97,3
23.	Naga Juang	2396	2449	4845	97,8
Mandailing Natal 2020		235478	237408	472886	99,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Madina 2020

Dari 23 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, wilayah Kecamatan Penyabungan merupakan Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah 90049 jiwa dengan rasio 97,8, yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44533 jiwa dan perempuan sebanyak 45516 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua yaitu Kecamatan Siabu dengan jumlah penduduk sebesar 53286 jiwa dengan rasio 95,6, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 26048 dan perempuan sebesar 27238. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu Kecamatan Ulu Pungkut dengan jumlah penduduk sebesar 4674 jiwa dengan rasio 100,1, jumlah yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 2338 jiwa dan yang berjenis perempuan yaitu sebesar 2336 jiwa. Sedangkan kecamatan kedua yang memiliki jumlah penduduk yang terendah yaitu Kecamatan Naga Juang dengan jumlah penduduk sebesar 4845 Jiwa dengan rasio 97,8, yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 2396 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 2449 jiwa.

Tabel 4.2
Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, 2020

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²
1.	Batahan	2206	4,76	45
2.	Sinunukan	21527	4,55	125
3.	Batang natal	25333	5,36	39
4.	Lingga Bayu	27576	5,83	143
5.	Ranton Baik	14085	2,98	92
6.	Kotanopan	27871	5,89	86

7.	Ulu Pungkut	4674	0,99	16
8.	Tambangan	10913	2,31	69
9.	Lembah Sorik Marapi	10968	2,32	316
10.	Puncak Sorik Marapi	8975	1,90	162
11.	Muara Sipongi	12528	2,65	92
12.	Pakantan	2222	0,47	24
13.	Panyabungan	90049	19,04	347
14.	Panyabungan Selatan	10323	2,18	118
15.	Panyabungan Barat	10677	2,26	122
16.	Panyabungan Utara	22573	4,77	354
17.	Panyabungan Timur	14214	3,01	36
18.	Huta Bargot	8748	1,85	75
19.	Natal	33897	7,17	36
20.	Muara Batang Gadis	22322	4,72	16
21.	Siabu	53286	11,27	154
22.	Bukit Malintang	12771	2,70	186
23.	Naga Juang	4845	1,02	83
	Madina	472886	100,0	71

Sumber: Badan Pusat Statistik Madina 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 23 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, wilayah Kecamatan Panyabungan merupakan Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Mandailing Natal mempunyai jumlah penduduk sebesar 90049 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk sebesar 347 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan kedua yang memiliki jumlah kepadatan penduduk adalah Kecamatan Siabu dengan jumlah penduduk 53286 jiwa sehingga kepadatannya adalah 154 jiwa/Km². Kecamatan Ulu Pungkut yang merupakan Kecamatan yang mempunyai penduduk terendah yaitu 4674 jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 16 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan kedua yang mempunyai kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Naga Juang dengan jumlah

penduduk sebesar 4845 jiwa sehingga mempunyai kepadatan penduduk sebesar 83/Km². Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal relatif belum merata.

4.2.2 Tenaga Kerja

Pengangguran yang tinggi, penyediaan lapangan kerja baru dan produktivitas tenaga kerja yang rendah adalah permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat penanganan yang sangat serius dari pemerintah. Permasalahan ketenagakerjaan tersebut jika tidak segera diatasi akan dapat menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa indikator mengenai ketenagakerjaan juga dapat dijadikan sebagai ukuran atau barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi maupun pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran. Namun dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga kerja jauh lebih tinggi dibandingkan penyediaan lapangan kerja baru dan penggunaan teknologi yang relatif kurang padat karya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipacu oleh pertumbuhan konsumsi dan bukan karena penanaman modal baru (investasi) dan perluasan usaha. Pertumbuhan ekonomi seharusnya diiringi dengan peningkatan produktivitas. Tetapi hal itu juga kadang kala sulit tercapai karena pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan tenaga kerja tidak diikuti dengan peningkatan output per tenaga kerja yang memadai. Pemilihan teknologi yang padat

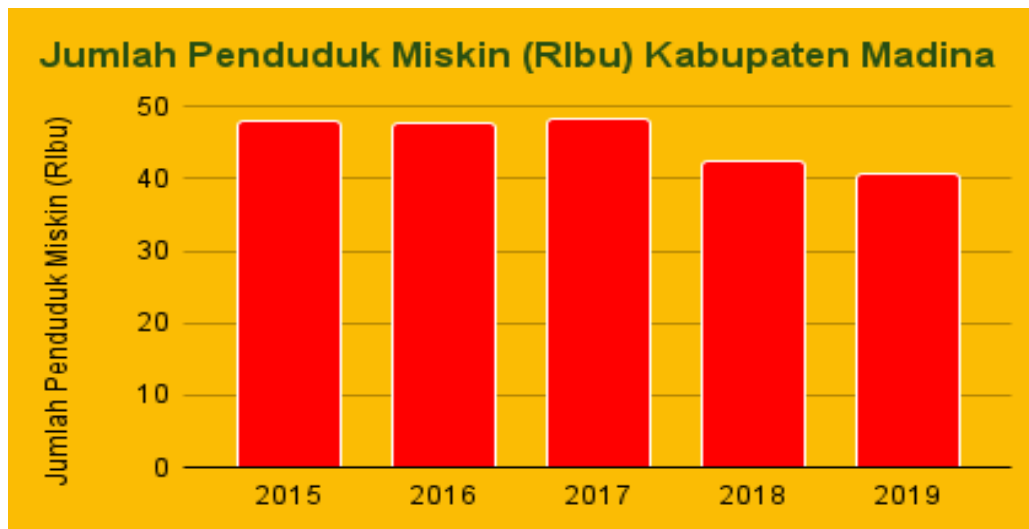
karya harus lebih diutamakan untuk lebih dapat menyerap pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tinggi.

Permasalahan ketenagakerjaan harus mendapatkan perhatian lebih serius dikarenakan besarnya dampak yang timbul akibat kurangnya penyerapan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran (angkatan kerja yang tidak bekerja) yang tinggi akan berkaitan langsung terhadap meningkatnya permasalahan sosial yang lain, di antaranya masalah kriminalitas yang meningkat dan permasalahan kemiskinan yang akan cenderung meningkat pula. Salah satu cara dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan mengencangkan program-program pemerintah dalam penyediaan pendidikan, seperti mengadakan program-program pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan program kewirausahaan bagi para pencari kerja. Dalam hal ini, kewajiban pencari kerja untuk mendaftar di Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu persyaratan administrasi pada proses perekrutan pegawai di dunia usaha cukup memberikan ruang bagi pemerintah untuk memonitor kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 4.2

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal (Ribu) Tahun 2015-2019.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal 2020



Berdasarkan grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal diatas dapat dilihat di tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 47,79 ribu, di tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak signifikan dengan jumlah 47,67 ribu, di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal menjadi 48,3 ribu sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dengan jumlah 42,39 ribu sedangkan di tahun 2019 terus mengalami penurunan sehingga menjadi 40,64 ribu penduduk miskin yang berada di Kabupaten Mandailing Natal.

4.2.3. Kesehatan

Program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan usia harapan hidup penduduk serta mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Penduduk yang sehat merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Hal ini berarti penduduk yang sehat memiliki potensi atau kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan

produktivitas akan meningkatkan nilai tambah ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tubuh yang sehat secara fisik memungkinkan seseorang untuk melakukan segala kegiatan sehingga mencapai hasil yang optimal dan mampu menjadi manusia berkualitas. Derajat atau tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu, keturunan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk juga sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang dikonsumsi penduduk. Dengan asupan makanan yang sehat bernutrisi maka tubuh akan menerima dampak positifnya. Tubuh harus menerima asupan makanan yang sesuai dengan takaran serta nilai-nilai kesehatan yang ada. Gizi yang cukup mampu mengatasi berbagai penyakit dan mencegah terjadinya masalah kesehatan. Tujuan utama pembangunan bidang kesehatan adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui pembangunan bidang kesehatan diharapkan dapat terwujud derajat kesehatan penduduk yang setinggi-tingginya sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan angka harapan hidup. Dalam mewujudkan derajat kesehatan penduduk setinggi-tingginya tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan misalnya melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan beserta tenaga medis berkualitas. Penyediaan prasarana kesehatan yang memadai sangatlah penting. Prasarana kesehatan yang memadai juga harus didukung dengan terpenuhinya gizi yang dikonsumsi penduduk sesuai dengan batas minimal kecukupan gizi. Tercukupinya gizi sejak usia dini dapat memperkecil peluang timbulnya stunting, sehingga harapannya lahirlah generasi sehat yang merupakan salah satu pendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesehatan.

Gambar 4.3

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir, 2014-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Madina

Berdasarkan dari gambar di atas dari tahun 2014 -2020 besaran persentase masyarakat yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi di tahun 2014 dengan jumlah sebesar 24,22 persen, ditahun 2015 mulai mengalami penurunan sehingga menjadi 12,13persen. Besaran persentase ini terus mengalami penurunan dan kenaikan seiring dengan keadaan cuaca dan yang lainnya. Sehingga di tahun 2020 sebanyak 13,48 persen masyarakat yang mengeluh dengan ada penyakit di diri mereka.

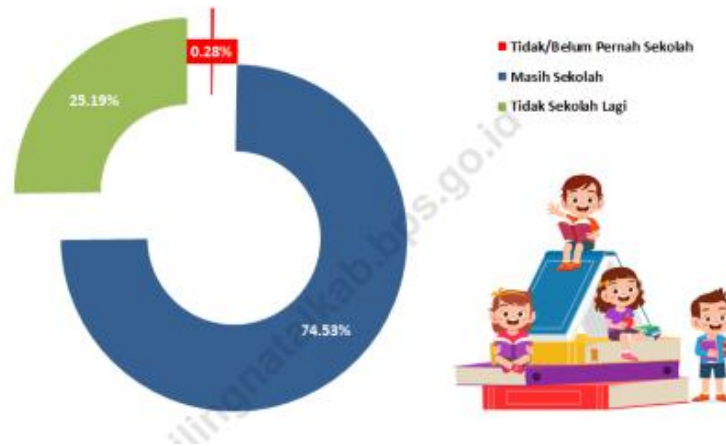
4.2.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi produktif bagi suatu negara dan masyarakatnya. Dengan pendidikan yang cukup, masyarakat diharapkan akan mempunyai akses yang

lebih besar pada informasi serta lebih mampu menerapkan dan memanfaatkan hasil kemajuan teknologi dan selanjutnya diharapkan akan meningkatkan standar hidup dan perekonomian masyarakat. Untuk menuju kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pembangunan, pemerintah mencanangkan program wajib belajar serta menyediakan sarana sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Kesuksesan program wajib belajar baik di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah tergantung dari ketersediaan fasilitas pendidikan dan kemudahan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Semakin lengkap fasilitas pendidikan yang dimiliki dan semakin mudah mengakses fasilitas pendidikan maka kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut akan lebih baik dan berkualitas. Faktor lainnya yang cukup penting bagi masalah pendidikan adalah tersedianya guru dengan rasio terhadap peserta didik yang ideal. Artinya guru tidak dibebani tanggung jawab mengajar dalam jumlah kelas maupun jumlah murid yang melebihi batas kemampuan idealnya. Dengan rasio antara jumlah guru terhadap jumlah murid yang ideal, proses belajar mengajar akan dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Kepadatan murid dalam kelas yang ditunjukkan dari rasio murid terhadap kelas juga dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Keberhasilan program wajib belajar dan kualitas pendidikan sumber daya manusia dapat diukur dari jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid, rasio murid terhadap guru, dan lainlain. Untuk memperluas kesempatan bersekolah bagi masyarakat, pemerintah senantiasa berusaha menambah daya tampung dari fasilitas belajar mengajar terutama sekolah-sekolah formal. Penambahan daya tampung sekolah dilakukan melalui penambahan sekolah,

penambahan ruang belajar mengajar maupun juga pada Indikator Sosial Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

Gambar 4.4
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Sekolah, tidak sekolah lagi, dan belum sekolah 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Madina

Berdasarkan pada gambar diatas persentase penduduk usia 7-24 Tahun yang masih sekolah sebesar 74,53 persen dan yang belum sekolah 0,25 persen yang menjadi pusat perhatian adalah jumlah perentase penduduk usia 7-24 tahun yang tidak sekolah lagi sebesar 25,19 persen. Hal ini sangat didasari dari tuntutan faktor ekonomi yang menghasruskan mereka putus sekolah dan mencari uang demi kelangsungan hidup selanjutnya.

4.2.5 Perkembangan IPM Kabupaten Mandailing Natal

Table 4.3

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandaling Natal 2016-2020

Kabupaten	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mandailing Natal					

	64,55	65,13	65,83	66,52	66,79
--	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat data IPM di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016 sebesar (64,55) di tahun 2017 menjadi sebesar (65,13) dan di tahun 2018 menjadi sebesar (65,83) peningkatan (0,63) ke tahun 2019 sehingga menjadi (66,52) dan mengalami peningkatan lagi (0.27) ke tahun 2020 sehingga IPM menjadi sebesar (66,79). Berdasarkan tabel IPM dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Disuatu daerah IPM mendekati 100 maka disuatu daerah dianggap kualitas manusia tersebut dikatakan bagus.

4.3 Perkembangan Indikator Ekonomi

Tabel 4.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mandailing Natal (Miliar Rupiah) 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	4.271,58	4.689,25	5.158,32	5.497,99	5.819,71
Pertambangan Dan Penggalian	61,1	71,62	72,91	77,08	83,43
Industri Pengolahan	986,33	1.123,50	1.302,82	1.426,42	1.550,42
Pengadaan Listrik Dan Gas	6,72	7,40	8,30	9,05	9,51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	2,06	2,22	2,43	2,58	2,79

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Konstruksi	1,230,04	1.381,69	1.511,68	1.671,49	1.839,81
Perdagangan Besar Dan Eceran, Refarasi Mobil Dan Sepeda Motor	1.312,05	1.493,89	1.637,61	1.795,71	1.968,61
Transportasi Dan Pergudangan	188,33	214,99	225,54	244,23	260,40
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	74,43	81,36	85,91	93,55	100,86
Informasi Dan Komunikasi	72,84	76,76	81,75	87,13	89,12
Jasa Keuangan Da Asuransi	145,47	159,89	168,34	174,17	180,66
Real Estate	265,63	295,39	311,19	336,52	351,53
Jasa Perusahaan	10,44	11,01	11,96	12,53	13,51
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	753,60	826,34	894,80	931,82	1.001,95
Jasa Pendidikan	121,83	134,29	142,60	153,21	160,91
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	80,81	86,97	92,51	100,46	107,04
Jasa Lainnya	3,16	3,48	3,84	4,11	4,48
PDRB	9.586,34	10.660,04	11.712,51	12.618,05	13.544,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Mandailing Natal 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 9.586,34 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 10.656,12 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar rupiah sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 12.618,05 miliar rupiah dan di tahun 2019 sebesar

12.541,05 miliar rupiah. Lapangan usaha yang menajadi penyumbang terbesar untuk PDRB setiap tahunnya itu sector pertanian dimana ditahun 2015 sebesar 4.271,58, di tahun 2016 sebesar 4.689,25, di tahun 2017 yaitu sebesar 5.158,32, sedangkan di tahun 2018 sebesar 5.497,99 dan di tahun 2019 yaitu sebesar 5.819,71. Sedangkan untuk lapangan usaha yang paling sedikit berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Mandailing Natal yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang dimana di tahun 2015 sebesar 2,06, tahun 2016 sebesar 2,22, ditahun 2017 yaitu sebesar 2,43 sedangkan ditahun 2018 sebesar 2,85 dan ditahun 2019 yaitu sebesar 2,79. Lapangan usaha penyumbang terbesar terhadap kenaikan jumlah PDRB yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Di tahun 2015 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang terhadap PDRB sebesar 4.271,58 miliar rupiah, tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 4.689,25 miliar rupiah, tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 5.158,32 miliar rupiah sedangkan ditahun 2018 terus mengalami kenaikan sehingga menjadi 5.497,99 miliar rupiah dan di tahun 2019 menajadi 5.819,71 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai matapencaharian sebagai petani dan nelayan di Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 4.5

**PDRB Kabupaten Mandailing Natal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB),
PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Madina

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 9.586,34 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 10.656,12 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar rupiah sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 12.618,05 miliar rupiah dan di tahun 2019 sebesar 12.541,05 miliar rupiah. Sedangkan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019, di tahun 2015 jumlah PDRB ADHK yaitu sebesar 7.473,72 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 7.933,13 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 8.416,50 miliar rupiah sedangkan ditahun 2018 yaitu sebesar 8.904,14 miliar rupiah, dan di tahun 2019 9.376,46 miliar rupiah, dengan laju pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 6,21%,

tahun 2016 sebesar 6,18%, di tahun 2017 sebesar 6,09% sedangkan ditahun 2018 yaitu sebesar 5,79% dan di tahun 2019 yaitu sebesar 5,30%.

4.4 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 4.5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2019 (ribu rupiah)

Nomor	Tahun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1	2017	2.471.464.537,26
2	2018	2.695.512.046,84
3	2019	3.102.834.618,07

Sumber: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab.Madina 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan, di tahun 2017 jumlah APBD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 2.471.461.537,26 , di tahun 2018 Rp. 2.695.512.046,84 sedangkan di tahun 2019 jumlah APBD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 3.102.834.618,07.

Tabel 4.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mandailing Natal (Miliar) tahun 2017-2019

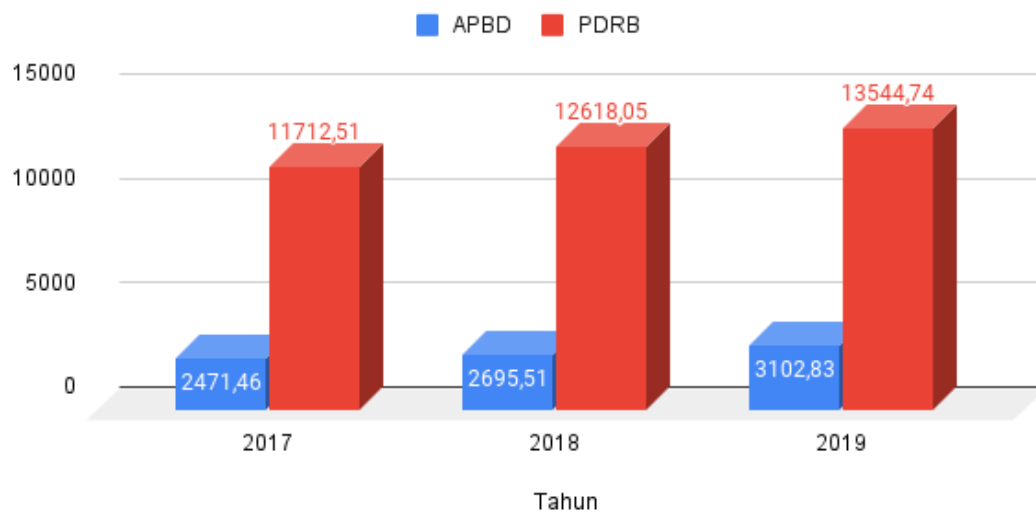
Nomor	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto
1	2017	11.712,51

2	2018	12.618,05
3	2019	13.544,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Mandailing Natal 2020

Berdasarkan tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017-2019 dapat dilihat nilai PDRB terus mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2017 sebesar 11.712,51 sedangkan ditahun 2018 meningkat sebesar 905,54 sehingga menjadi 12.618,05 dan ditahun 2019 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 926,69 sehingga menjadi 13.544,74.

Perbandingan APBD dan PDRB Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2017 - 2019 (satuan miliar)



Sumber: Data diolah 2021

Dari diagram perbandingan APBD dan PDRB kabupaten Mandailing Natal 2017 – 2019 menunjukkan tren peningkatan. Apabila kita lihat data di atas menunjukkan

bahwa APBD Mandailing natal setiap tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 APBD 2.471,46 miliar dan pada tahun 2018 2.695,51 miliar dan hingga pada tahun 2019 mencapai angka 3.102,83 miliar. Sedangkan pada PDRB juga mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar dan pada tahun 2018 naik menjadi 12.618,05 hingga pada tahun 2019 menjadi 13.544,74. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah APBD berjalan seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam kata lain peningkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Purnama (2019) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan kondisi sosial seperti variabel kemiskinan, IPM dan pengangguran setiap tahunnya mengalami kenaikan, dari kondisi ekonomi seperti variabel PDB, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi infrastruktur juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi pasca kebijakan fiskal Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari analisis yang dilakukan Perkembangan indikator sosial di Kabupaten Mandailing Natal setiap tahunnya terus meningkat hal ini dapat dilihat dari kesehatan, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang setiap tahunnya terus meningkat dan jumlah kemiskinan terus menurundan indikator ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Dari analisis yang dilakukan terhadap perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Mandailing Natal di era kepemimpinan Dahlan-Sukhairi yaitu ditahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah APBD berjalan seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam kata lain peningkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB.

73

5.2 Saran

1. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal, masyarakat juga harus berpartisipasi mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal, agar setiap tahunnya jumlah APBD terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. 2011. *A Dictionary of Economics*. Inggris: Penguin Books Ltd
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS), Tahun 2020
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). 2021
- Badan Pusat Statistik(BPS) *Kabupaten Mandailing Natal* 2020
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka* .2020
- Deddy T. Tikson. 2005. *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*,Edisi keempat. Erlangga. Jakarta.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Press
- Manurung,Mandala. 2008. *Teori ekonomi makro*. Edisi keempat: lembaga penerbit FE UI.
- Lexy. J. Moelong, (2000) *Metodologi penelitian Kuantitatif*, Bandung PT Remaja Posdayakarya.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Pratikno, Riyono, *Komunikasi dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1999
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2015. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 12.

Jakarta: Erlangga.

Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9.

Jakarta: Erlangga.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RASYID ZAMZAMI HSB
N.P.M : 1705180035
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : GG. KELUARGA KOMP. ZIPUR
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL DAN EKONOMI PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab I - III hrs diaman: dan di Ley- kani luy 4/ disetujui dan pu- misan mster dan Tujuan Penelitian		
	Bab IV hrs diaman: dan Gambaran Umum : Geografi - Topografi + Demografi + Ekonomi dan Sosial. 4/ 2 km terakhir (2019-2020)		
	Bab V hrs di kumpulkan dan Amalan tujuan Penelitian yaitu: - Paralel Indikator SOS EKO - Pertumbuhan APBN		
	Bab VI hrs jwb 4/ kumpulkan dan Saran yg harus di ambil pd Bab VI (di am)		
21/10-21	AEC 4/ di kumpulkan !!		

Medan, ~~21~~ 21 September 2021

Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini 08 Juli 2021 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Rasyid Zamzami Hsb
N.P.M. : 1705180035
Tempat / Tgl.Lahir : Sigalayang Julu, 27 Juni 1997
Alamat Rumah : Jalan Lintas Timur, Sigalayang Julu, Kec. Panyabungan
JudulProposal : ANALISIS PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL DAN EKONOMI PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	Identifikasi Masalah
Bab II	Hipotesis dihapus
Bab III	Pertbaiki kerangka konseptual, Depresi, ekspansi dan Penelitian
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 08 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.,

Sekretaris

Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 175/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/2/2021

Nama Mahasiswa : Rasyid Zamzami Hsb
 NPM : 1705180035
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : Perencanaan pembangunan daerah (PPD)
 Tanggal Pengajuan Judul : 22/2/2021
 Nama Dosen pembimbing^{*)} : *Prawidya H S*
 Judul^{**)} : *Analisis Perkembangan Indikator Sosial dan
 Ekonomi Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada
 Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara*

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:

*) Disiisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Disiisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 175/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 22/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rasyid Zamzami Hsb
NPM : 1705180035
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan pembangunan daerah (PPD)

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

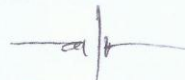
Identifikasi Masalah : Perkembangan sosial

Rencana Judul : 1. Analisa perkembangan indikator sosial pada kabupaten Mandailing Natal provinsi sumatera Utara tahun 2010 - 2020
2. Analisis dampak kegiatan pertambangan emas ilegal terhadap perekonomian masyarakat kabupaten Mandailing Natal
3. Dampak pertambangan emas ilegal terhadap lingkungan hidup di kabupaten Mandailing Natal

Objek/Lokasi Penelitian : Pemkab Mandailing Natal

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Rasyid Zamzami Hsb)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapd. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **08 Juli 2021** menerangkan bahwa:

Nama : Rasyid Zamzami Hsb
N .P.M. : 1705180035
Tempat / Tgl.Lahir : Sigalapang Julu, 27 Juni 1997
Alamat Rumah : Jalan Lintas Timur, Sigalapang Julu, Kec. Panyabungan
JudulProposal :ANALISIS PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL DAN EKONOMI PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.,*

Medan, Rasyid Zamzami Hsb

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.,

Pemanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 175/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 22/2/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rasyid Zamzami Hsb
NPM : 1705180035
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan pembangunan daerah (PPD)

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

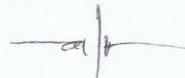
Identifikasi Masalah : Perkembangan sosial

Rencana Judul : 1. Analisa perkembangan indikator sosial pada kabupaten Mandailing Natal provinsi sumatera Utara tahun 2010 - 2020
2. Analisis dampak kegiatan pertambangan emas ilegal terhadap perekonomian masyarakat kabupaten Mandailing Natal
3. Dampak pertambangan emas ilegal terhadap lingkungan hidup di kabupaten Mandailing Natal

Objek/Lokasi Penelitian : Pemkab Mandailing Natal

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Rasyid Zamzami Hsb)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **08 Juli 2021** menerangkan bahwa:

Nama : Rasyid Zamzami Hsb
N .P.M. : 1705180035
Tempat / Tgl.Lahir : Sigalapang Julu, 27 Juni 1997
Alamat Rumah : Jalan Lintas Timur, Sigalapang Julu, Kec. Panyabungan
JudulProposal :ANALISIS PERKEMBANGAN INDIKATOR SOSIAL DAN EKONOMI PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.,*

Medan, Rasyid Zamzami Hsb

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.,

Pemanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Rasyid Zamzami Hsb
N.P.M : 1705180035
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
17/03-21	Das I, bny yg harus dirinci lagi tambahkan Das - 4 mendiskusikan masalah dan Menganalisis		
09/04-21	Revisi Masalah dan Tujuan Penelitian yg akan di susun/kanakan hrs kogn dan Metode Penelitian yg dipilih		
23/04-21	Das II, Struktur awal dan Grand Theory - Penelitian Terdahulu - Menganalisis mg OMA + tabel Desentralisasi Fiskal.		
20/05-21	Das III, awal dan penulisan Pembantu Pembantu Ketua Mandailing Natal dan Pembantu Mandailing 4/ mengulas rumus dan hasil penelitian		
22/06-21	Revisi Kertas Penelitian buat Bab mulut dgn foto/foto		
24/6-21	Acc semua Das I-III selh dirum 1/1 Grup ul di seminar		

Medan, 24 Juni 2021
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi

Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

